

## Pancasila Sebagai Sistem Etika : Analisis Nilai-Nilai Fundamental dan Implementasinya di Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1\*</sup>, Ashfiya Nur Atqiyah<sup>2</sup>, Rahdatu Cahya Puranita<sup>3</sup>,  
Inas Lutfiyah<sup>4</sup>, Salsyabila Apriliyani<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Direktur pusat studi konstitusi dan hukum islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3,4,5</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)<sup>2</sup>, [puranitarahdatu@gmail.com](mailto:puranitarahdatu@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[inaslutfiyah276@gmail.com](mailto:inaslutfiyah276@gmail.com)<sup>4</sup>, [salsyabillaapriliani@gmail.com](mailto:salsyabillaapriliani@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah  
57126

Korespondensi penulis: [am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)

**Abstract:** Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays an important role as an ethical system that guides national and state life. This study aims to explore and analyze how the values of Pancasila as an ethical system. The research method used is a literature study. Through this approach, various sources of literature such as textbooks, journal articles, academic papers, and legal documents are collected and critically analyzed. The results of this study indicate that the five principles of Pancasila, namely Belief in the One Almighty God, Just and Civilized Humanity, Unity of Indonesia, Democracy Guided by the Wisdom of Deliberation/Representation, and Social Justice for All Indonesian People each contain fundamental values. This study identifies the need for a more integrative approach in translating the principles of Pancasila into real policies and actions.

**Keywords:** Pancasila, ethical system, ethics

**Abstrak:** Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memainkan peran penting sebagai sistem etika yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Melalui pendekatan ini, berbagai sumber literatur seperti buku teks, artikel jurnal, makalah akademik, dan dokumen hukum dikumpulkan dan dianalisis secara kritis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia masing-masing mengandung nilai-nilai fundamental. Penelitian ini mengidentifikasi perlunya pendekatan yang lebih integratif dalam menerjemahkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan dan tindakan nyata.

**Kata Kunci:** Pancasila, sistem etika, etika

### 1. PENDAHULUAN

Pancasila, yang diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945, merupakan landasan filosofis dan etis yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem etika, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai pedoman hukum tetapi juga sebagai panduan moral yang membentuk karakter bangsa. Pancasila, dengan lima sila-nya, mencerminkan nilai-nilai universal yang diharapkan dapat memandu perilaku individu dan masyarakat dalam mencapai keharmonisan dan keadilan sosial. (Moh. Gufron Eramansyah, Safitri, Masduki Asbari, 2022)

Pancasila sebagai sistem etika berfungsi untuk membimbing perilaku individu dan masyarakat dengan nilai-nilai moral yang diintegrasikan dalam setiap sila. Kelima sila dalam Pancasila saling terkait dan memberikan kerangka kerja etis yang memandu interaksi sosial serta pengambilan keputusan. ( Nanda Putri Amelia, Intan Sabila, and Masduki Asbari, 2022)

Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman yang komprehensif untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Kelima sila-nya mencakup nilai-nilai universal yang mendasari prinsip moral dan sosial, sementara implementasinya dalam sistem hukum negara memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebuah ideologi politik, tetapi juga sebuah sistem etika yang mendasari seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. (Leroy Jonastyo and others, 2024)

Penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan efektif dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti ketidakadilan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya ketidakpastian dalam implementasi prinsip Pancasila, masyarakat mungkin kehilangan arah dalam mencapai tujuan negara yang lebih besar, seperti kesejahteraan sosial dan stabilitas politik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode studi kepustakaan dipilih karena kemampuannya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, sehingga memberikan landasan yang kokoh untuk memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etika dan hukum.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber yang terdiri dari buku teks, artikel jurnal, makalah akademik, dokumen hukum, serta laporan penelitian yang membahas sejarah, filosofi, dan implementasi Pancasila. Pengumpulan dilakukan melalui akses ke perpustakaan, basis data digital, dan repositori institusi yang menyediakan sumber-sumber berkualitas dan relevan. Penelitian ini memastikan bahwa hanya sumber yang kredibel dan terbaru yang dimasukkan untuk menjamin keakuratan dan relevansi informasi.

Setelah pengumpulan, langkah selanjutnya adalah penganalisisan. Proses analisis melibatkan pembacaan kritis terhadap setiap sumber untuk mengidentifikasi tema-tema utama, argumen, dan temuan yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Analisis ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan dalam praktik etika, tetapi juga mencermati tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya serta solusi yang diusulkan. Melalui analisis ini, dapat mengevaluasi

kontribusi masing-masing sumber terhadap pemahaman yang lebih luas dan mengidentifikasi gap dalam penelitian sebelumnya.

Hasil analisis dari berbagai sumber literatur kemudian disintesis untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh tentang topik penelitian. Sintesis ini menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan dalam pandangan dan temuan terkait Pancasila. Proses ini bertujuan untuk menyusun argumen yang koheren mengenai penerapan prinsip Pancasila sebagai sistem etika dalam sosial dan hukum. Pembahasan hasil sintesis ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Pancasila Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai sistem etika.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Etika dan Pancasila sebagai Sistem Etika**

Etika menurut bahasa Yunani adalah *ethos* (kebiasaan) sedangkan menurut bahasa Latin adalah *mores* (Jamak). Menurut K. Bertens adalah suatu norma yang membantu suatu kelompok dalam berperilaku atau bertindak. Pandangan H. A. Mustofa adalah menyelidiki tindakan atau mempertimbangkan suatu tindakan tersebut. Aristoteles memberikan pandangan bahwa ilmu pengetahuan yang membahas tentang perbuatan manusia. (M. Yatimin Abdullah, 2006)

Etika, selain sikap kritis, berkaitan dengan moralitas secara rasional. Setiap nilai dan norma diperiksa dan ditemukan dasar rasional untuk menerimanya. Hal ini memperjelas bahwa pertimbangan etis selalu mendasar. Ciri mendasar ini adalah etika tidak sekedar memberikan penjelasan suatu moral tetapi juga mempertimbangkan pandangan secara umum yang kemungkinan dibenarkan membedakan etika.

#### **Ciri-ciri Etika:**

- a. Mutlak
- b. Tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain
- c. Cara pandang naluri seseorang
- d. Tentang perbuatan, perilaku, dan tingkah laku seseorang

#### **Macam-Macam Etika:**

- a. Menurut Jenis
  - 1) Normatif

Contohnya adalah berkata jujur ketika membuat suatu kesalahan yang tidak disengaja.

2) Deskriptif

Contohnya adalah menjaga sopan santun ketika berbicara didepan publik.

b. Menurut cakupan

1) Etika Khusus

Contohnya adalah ketika sedang menggunakan media sosial menggunakan bahasa yang baik, menghindari SARA.

2) Etika Umum

Contohnya adalah menghormati orang lain ketika sedang menyampaikan pendapatnya.

c. Menurut lingkungan

1) Menghargai privasi orang lain setiap individu

2) Tidak memandang rendah orang lain, karena dapat memicu konflik yang tidak diinginkan

3) Menurut sumbernya

4) Etika Teologis

5) Etika Filosofis

**Fungsi dan Manfaat Etika:**

a. Fungsi

1) Memperoleh perspektif kritis untuk menghadapi beragam moralitas, memerlukan sikap pencerahan terhadap sesuatu

2) Dapat mengkaji dan menggunakan bentuk gagasan yang sistematis

3) Menyelidiki masalah sampai ke akar-akarnya

b. Manfaat

1) Sebagai mediator Antar nilai

2) Dapat bersikap kritis

3) Dapat membentuk karakter

4) Menentukan falsafah

**Aliran-aliran Besar Etika:**

a. Deontologi

Berorientasi pada kewajiban atau keharusan yang mempunyai watak kelayakan,

kepatuhan, dan kepantasan

b. Teleologi

Berorientasi pada konsekuensi atau akibat yang mempunyai karakter

c. Keutamaan (*Aristoteles 384—322 SM*)

Berorientasi pada keutamaan atau kebijakan yang mengandalkan karakter. (Dinda Rizky Ikebayu, 2022)

### **Etika Pancasila**

Sebagai sistem etika mencakup banyak aspek kehidupan karena merupakan moralitas yang dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Menurut para ahli, Etika Pancasila adalah suatu sistem yang menjadi pedoman di Indonesia. Pancasila merupakan etika teologis dan Pancasila dianggap sebagai pedoman moral bangsa Indonesia. Nilai Pancasila bersifat universal, Pancasila merupakan kekayaan yang melekat pada negara Indonesia yang artinya menjadi jati diri bangsa. (Putri F.S dan Dewi D.A, 2022)

### **Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi**

Penguatan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila merupakan kunci untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika mengingat bahwa pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai ini penting untuk pembentukan karakter dan identitas nasional. (Sandi Arifin and others, 2023)

Pada tingkat pendidikan dasar, pengajaran Pancasila harus dilakukan dengan cara yang interaktif dan menarik, menggunakan metode yang sesuai dengan usia siswa. Ini bisa mencakup kegiatan seperti role-playing, diskusi kelompok, dan proyek-proyek kreatif yang memungkinkan siswa untuk mengalami dan memahami nilai-nilai Pancasila secara langsung. Contohnya, dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Melalui cara ini, tidak hanya mempelajari teori tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata. (Irawati Nuraeni and Dinie Anggraeni Dewi, 2022)

Di tingkat pendidikan menengah, pendekatan dapat lebih mendalam dengan memasukkan studi kasus mengenai penerapan Pancasila dalam berbagai sosial dan politik. Mata pelajaran seperti Sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan bisa diperluas untuk mencakup analisis bagaimana nilai-nilai Pancasila berperan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor. Diskusi yang melibatkan perdebatan dan kajian mendalam dapat membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan memahami kompleksitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam situasi yang berbeda. (Ishviati Joenaini

Koenti, Takaria Dinda Diana Ethika, and Rendradi Suprihandoko, 2022)

Pada tingkat perguruan tinggi, materi ajar Pancasila perlu disesuaikan dengan bidang studi yang spesifik. Misalnya, di Fakultas Hukum, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana nilai-nilai Pancasila mempengaruhi sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Di Fakultas Ekonomi, mereka bisa mengeksplorasi bagaimana prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan bisnis. Penelitian dan studi kasus yang melibatkan aplikasi Pancasila dalam global juga bisa menjadi bagian dari kurikulum untuk membantu mahasiswa memahami relevansi nilai-nilai ini dalam skala internasional. (Fatma Ulfatun Najicha, 2023)

Untuk pendidikan menengah, pendekatan studi kasus dan diskusi mendalam lebih sesuai karena siswa pada usia ini sudah dapat memahami kompleksitas isu-isu sosial dan politik. Frekuensi penerapan yang lebih rendah, seperti mingguan atau bulanan, mencerminkan bahwa materi ini lebih terfokus pada topik-topik tertentu dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam.

Di tingkat perguruan tinggi, materi ajar yang lebih kompleks seperti analisis kasus dan penelitian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai Pancasila dan profesional. Frekuensi penerapan bulanan atau per semester mencerminkan kebutuhan untuk integrasi yang lebih mendalam dan analitis dari prinsip-prinsip ini dalam berbagai disiplin ilmu.

Sosialisasi melalui media massa dan komunitas dirancang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan melibatkan masyarakat umum secara berkelanjutan. Kampanye sosial dan program di media massa berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan penyebaran nilai-nilai Pancasila secara luas, sementara seminar dan workshop di tingkat komunitas memberikan kesempatan untuk diskusi yang lebih mendalam dan interaktif.

### **Penerapan dalam Kebijakan Publik**

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika ini tercermin dalam setiap keputusan dan peraturan yang dibuat. Untuk mencapai hal ini, proses pembuatan kebijakan harus melibatkan berbagai tahapan yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan revisi. (PAWAR Ras and YPWHJ Risma, 2022)

Pada tahap perencanaan, penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan tujuan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan penilaian awal mengenai bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi keadilan sosial, persatuan, dan

kesejahteraan masyarakat. (Leni Yulia and Dinie Anggraenie Dewi, 2021)

Kebijakan yang dirumuskan harus mencakup prinsip-prinsip Pancasila secara eksplisit dalam dokumen kebijakan. Misalnya, dalam kebijakan sosial, prinsip keadilan sosial harus menjadi salah satu tujuan utama yang diakomodasi dalam rencana dan strategi kebijakan serta memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat terlindungi. (Rosa Angela Stefany and Waspiah Waspiah, 2021)

Setelah kebijakan diterapkan, tahap evaluasi merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai metode, termasuk survei, wawancara, dan analisis data. (Hanifah Miftahul Jannah and others, 2023)

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap masyarakat dan menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, evaluasi harus mencakup analisis mengenai bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi pada pencapaian prinsip-prinsip Pancasila. Misalnya, evaluasi kebijakan ekonomi harus menilai apakah kebijakan tersebut mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi yang transparan dan objektif akan membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih baik dan memastikan bahwa kebijakan tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Abd Hamid, 2024)

Berdasarkan hasil evaluasi, revisi kebijakan mungkin diperlukan untuk mengatasi kekurangan atau masalah yang teridentifikasi. Proses revisi harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan mempertimbangkan umpan balik dari masyarakat. Revisi harus memastikan bahwa kebijakan tetap konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dan mampu mengatasi isu-isu yang muncul selama implementasi. Revisi juga harus mempertimbangkan perubahan dalam sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin mempengaruhi penerapan kebijakan. Kebijakan yang fleksibel dan adaptif akan lebih mampu menjawab tantangan yang berkembang dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. (Jonastyo, Leroy, Nur Miftahul Jannah, Nur Fadelia Rahmadhani, Joharudin Amin, Muh Evan Dwi Dhaniswara, and Meydina Diva Adinda, 2022)

Evaluasi kebijakan melibatkan penilaian dampak dan analisis hasil untuk menentukan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Metode evaluasi seperti survei, wawancara, dan analisis data memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Pada tahap revisi, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan analisis umpan balik masyarakat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diperbaiki dan

disesuaikan sesuai kebutuhan. Revisi yang berbasis pada umpan balik dan analisis perubahan akan memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

### **Pengembangan Model Penilaian Kinerja**

Pengembangan model penilaian kinerja yang berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika ini diintegrasikan dalam sistem penilaian dan evaluasi. Model ini harus dirancang untuk menilai kinerja individu, organisasi, dan institusi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas dan keputusan sehari-hari. (Tresna Suhartoni, 2024)

Kriteria penilaian harus mencakup berbagai aspek penerapan nilai-nilai Pancasila, termasuk integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, penilaian kinerja individu harus mempertimbangkan bagaimana seseorang menunjukkan sikap integritas dalam pekerjaan mereka, serta bagaimana mereka menerapkan prinsip keadilan dalam interaksi dengan rekan kerja dan masyarakat. Kriteria untuk organisasi dan institusi harus mencakup bagaimana kebijakan dan praktik mereka mendukung kesejahteraan sosial, persatuan, dan keadilan. (Muhammad Abyan Akbar, 2023)

Metode penilaian dapat melibatkan berbagai teknik, termasuk survei, wawancara, dan analisis dokumen. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari karyawan, pelanggan, dan masyarakat mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik. Analisis dokumen, seperti laporan tahunan dan kebijakan internal, dapat membantu menilai sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila tercermin dalam dokumen dan praktik organisasi. (Arini Hubbi Farodisa and others, 2023)

Implementasi model penilaian kinerja harus melibatkan pelatihan dan sosialisasi kepada semua pihak terkait mengenai kriteria dan metode penilaian. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara konsisten dan objektif. Setelah penilaian dilakukan, hasilnya harus dianalisis untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengembangkan rencana tindak lanjut. Tindak lanjut dapat mencakup pengembangan program pelatihan tambahan, revisi kebijakan dan praktik, serta peningkatan komunikasi mengenai nilai-nilai Pancasila. (Muhammad Mona Adha and Dayu Rika Perdana, 2020)

Model penilaian kinerja berbasis Pancasila mencakup aspek penilaian yang berbeda dengan kriteria dan metode yang sesuai. Untuk integritas individu, penilaian dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi, dengan tindak lanjut berupa pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan prinsip etika.



Keadilan sosial dinilai berdasarkan kesetaraan dan perlakuan adil, menggunakan metode seperti survei, analisis dokumen, dan wawancara. Tindak lanjut untuk keadilan sosial meliputi revisi kebijakan dan program edukasi untuk memastikan bahwa praktik organisasi mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial.

Tanggung jawab sosial dinilai berdasarkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan metode seperti survei, studi kasus, dan analisis data. Program tanggung jawab sosial perusahaan dan peningkatan komunikasi merupakan tindak lanjut untuk memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab sosial.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mempercepat penyebaran, integrasi, dan pemantauan prinsip-prinsip etika ini dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi menawarkan berbagai alat dan platform yang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, sosialisasi, dan penilaian kinerja berbasis Pancasila. (Nida Nur Azizah Putri, Kesya Adelia Avianika, and Maulia Depriya Kembara, 2023)

Platform e-learning dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyebarkan materi pendidikan mengenai Pancasila. E-learning memungkinkan pembuatan kursus online yang dapat diakses oleh siswa dan masyarakat luas, sementara aplikasi mobile dapat menyediakan informasi dan aktivitas interaktif yang mendukung pembelajaran Pancasila secara mandiri. Penggunaan media sosial juga dapat menjadi alat efektif untuk kampanye sosialisasi, dengan membagikan konten edukatif, video, dan infografis mengenai nilai-nilai Pancasila. (Ahira Nikma Priwardani, Ajeng Auriellia Dini Monica, and Muhammad Nur Fauzi Yaasiin, 2020)

Sistem informasi manajemen yang berbasis TI dapat digunakan untuk mendukung implementasi dan pemantauan kebijakan publik berbasis Pancasila. Sistem ini dapat mencakup fitur-fitur seperti pelaporan online, dashboard analitik, dan alat pemantauan yang memungkinkan pengumpulan data dan evaluasi kinerja secara real-time. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah dan organisasi dapat lebih efektif dalam memantau implementasi kebijakan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila diterapkan secara konsisten. (Muhammad Alvin Andrianto and others, 2023)

Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mendukung penilaian kinerja berbasis Pancasila. Sistem manajemen kinerja yang berbasis TI dapat menyediakan alat untuk melacak dan mengevaluasi kinerja individu dan organisasi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Fitur seperti formulir penilaian online, laporan kinerja otomatis, dan analisis data dapat membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penilaian yang objektif dan berbasis data. (Siti Hajar Lubis and others, 2024)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila menunjukkan berbagai aplikasi dan manfaat yang terkait dengan setiap jenis teknologi. Platform e-learning dan aplikasi mobile memberikan peluang untuk penyebarluasan informasi dan pembelajaran mandiri mengenai Pancasila. Implementasi ini melibatkan pengembangan kursus online dan aplikasi mobile yang dirancang untuk memfasilitasi akses dan interaksi yang efektif.

Sistem informasi manajemen, seperti dashboard analitik dan pelaporan online, menawarkan manfaat dalam pemantauan kebijakan dan pengumpulan data real-time. Integrasi sistem ini dengan sistem pemerintah memungkinkan pengelolaan dan pemantauan yang lebih efisien terhadap kebijakan yang berbasis Pancasila.

Teknologi penilaian kinerja, termasuk sistem manajemen kinerja dan laporan otomatis, mendukung penilaian berbasis data dan evaluasi objektif. Implementasi sistem ini memerlukan pengembangan sistem penilaian yang terintegrasi dan pelatihan pengguna untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan dengan cara yang konsisten dan berbasis data.

#### **4. SIMPULAN**

Penelitian ini, yang menggunakan metode studi kepustakaan, telah memberikan wawasan mendalam tentang Pancasila sebagai sistem etika dan implementasinya dalam sosial dan hukum di Indonesia. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber literatur, dapat disimpulkan bahwa Pancasila, dengan kelima sila-nya, berfungsi sebagai pedoman moral dan etis yang mendasar. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang dapat membimbing perilaku individu dan kolektif, serta memberikan landasan bagi pengambilan keputusan dalam sistem hukum dan pemerintahan.

Pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” menitik pada keyakinan kepada Tuhan dan menghargai keberagaman agama sebagai dasar dari toleransi dan keharmonisan sosial. Sila ini mendorong masyarakat untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran menghargai hak beragama orang lain.

Kedua, sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menekankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang penting untuk membangun hubungan sosial yang adil dan beradab.

Ketiga, sila “Persatuan Indonesia” menggarisbawahi pentingnya persatuan di tengah keragaman, yang merupakan kunci untuk menjaga integritas dan keharmonisan bangsa.

Keempat, sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” menekankan prinsip demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan kebijaksanaan dan transparansi.

Terakhir, sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menggarisbawahi perlunya keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang adil, yang esensial untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan inklusif.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti ketidakadilan sosial, konflik, dan ketidakstabilan politik yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih integratif dan adaptif dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan dan tindakan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hamid. (2024). Urgensi Pendidikan Pancasila Untuk Internalisasi Nilai Etika Bagi Mahasiswa. *An-Nahdiah*, 38-54.
- Ahira Nikma Priwardani, Ajeng Auriellia Dini Monica, and Muhammad Nur Fauzi Yaasiin. (2020). Pancasila Sebagai Sistem Etika. 226-32.
- Arini Hubbi Farodisa and others. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Etika Dan Moralitas Pada Usia Remaja. 35-43.
- Dinda Rizky Ikebayu. (2022).
- Fatma Ulfatun Najjicha. (2023). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dasar Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 397-403.
- Hanifah Miftahul Jannah and others. (2023). Korelasi Penegakkan Etika Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 76-88.
- Irawati Nuraeni and Dinie Anggraeni Dewi. (2022). Peranan Pancasila Sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknolog. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9989.
- Ishviati Joenaini Koenti, Takaria Dinda Diana Ethika, and Rendradi Suprihandoko. (2022). Ishviati Joenaini Koenti, TaAktualisasi Pancasila Dalam Etika Penyelenggara Negara Untuk Mewujudkan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. 221.
- Jonastyo, Leroy, Nur Miftahul Jannah, Nur Fadelia Rahmadhani, Joharudin Amin, Muh Evan Dwi Dhaniswara, and Meydina Diva Adinda. (2022). Analisis Peran Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. 221.

- Leni Yulia and Dinie Anggraenie Dewi. (2021). Pengamalan Butir Pancasila: Perwujudan Implementasi Pancasila Sebagai Etika Dalam Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 201.
- Leroy Jonastyo and others. (2024). Analisis Peran Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia: Analysis of the Role of Pancasila as Political Ethics in Law Enforcement and Justice in Indonesia. *Journal of Marginal Social Research*, 26-30.
- M. Yatimin Abdullah. (2006). *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pensada.
- Moh. Gufron Eramansyah, Safitri, Masduki Asbari. (2022). Pancasila as a Industrial Development Paradigm. *JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT*, 24-30.
- Muhammad Abyan Akbar. (2023). ETIKA GENERASI MILENIAL SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 28-35.
- Muhammad Alvin Andrianto and others. (2023). Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Komunitas Mobile Legends. *Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 58-62.
- Muhammad Mona Adha and Dayu Rika Perdana. (2020). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: 2020.
- Nanda Putri Amelia, Intan Sabila, and Masduki Asbari. (2022). Pancasila as a Paradigm of Science and Technology. *Journal of Information Systems and Management*, 1-6.
- Nida Nur Azizah Putri, Kesya Adelia Avianika, and Maulia Depriya Kembara. (2023). Peran Pancasila Sebagai Upaya Membangun Etika Anak Berkebutuhan Khusus Di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 89-96.
- PAWAR Ras and YPWHJ Risma. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Putri F.S dan Dewi D.A. (2022).
- Rosa Angela Stefany and Waspiah Waspiah. (2021). The Importance of Pancasila as a System and Source of Political Ethics in Indonesia. *Journal of Creativity Student*, 1-42.
- Sandi Arifin and others. (2023). The Importance of Pancasila Education as Learning Material in Higher Education. *Indonesian Journal of Educational Science and Technology*, 207.
- Siti Hajar Lubis and others. (2024). ‘Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika Di Kalangan Masyarakat. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 173-76.
- Tresna Suhartoni. (2024). ETIKA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SUNDA DAN BETAWI. *Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*.